

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN SISTEM KERJA WFO DAN WFH PASCA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H PERIODE TANGGAL 9 SAMPAI 13 MEI TAHUN 2022.

KPT KPU POSO NOMOR 0476/HK.03.2/7202/2022, 5 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN SISTEM KERJA WFO DAN WFH PASCA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H PERIODE TANGGAL 9 SAMPAI 13 MEI TAHUN 2022.

Abstrak : - Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Daerah Kabupaten Poso berdasarkan assessment; berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 978/SDM.03.5SD/04/2022 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sistem Kerja WFO dan WFH Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini di atur tentang penyesuaian sistem kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Sistem kerja WFO dan WFH Pasca Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H Periode Tanggal 9 Sampai 13 Mei Tahun 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 Mei 2022.